

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ariman, Rasyid, and Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2016.
- Box, Steven. *Power Crime and Mystification*. London & New York: Tavistock Publication, 1983.
- Faisal. *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Garner, Bryan A., (Ed.), “*Black’s Law Dictionary*”, Second Pocket Edition 2003.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*. Medan: Sofmedia, 2018.
- Heaton, Russel. *Criminal Law Textbook*. London: Oxford University Press, 2006.
- Hotmaulana, Rufinus H. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Keraf, Sonny. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.
- King, Colling and Nicholas Lord. *Negotiated Justice and Corporate Crime: The Legitimacy of Civil Recovery Orders and Deferred Prosecution Agreements*. United Kingdom: Palgrave Macmilan, 2018.
- Lamintang, and Fransiscus Theojunior. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Lubis, Muhammad Ridwan. *Mengurai Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korporasi di Indonesia*. Medan: Tungga Esti, 2022.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*.

Jakarta: Bina Aksara, 1983.

Mulyana, Asep. *Economic Approach in Law Enforcement Against Corporate Crime*. Jakarta: Grasindo, 2022.

Mulyana, Asep. *Deferred Prosecution Agreement Dalam Kejahatan Bisnis*. Jakarta: Grasindo, 2019.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Posner, Richard. *Economic Analysis of Law Ninth Edition*. Wolters Kluwe Law and Business in New York, 2014.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana Materil Jilid 1*. Yogyakarta: Karunia Kalam, 2005.

Qamar, Nurul and Farah Syah Reza. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal*. Makassar: Social Politic Genius, 2020.

Saputra, Roni and Totok Dwi Diantoro. *Implementasi dan Pengaturan Valuasi Kerugian Ekologis Dalam Perhitungan Kerugian Negara di Perkara Korupsi Sektor Industri Ekstraktif*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2024.

Sirait, Mangarap. *Hukum Pidana Korporasi dan Sistemasi Penegakannya Secara Integral*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2021.

Sudarto. *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto, 2013.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2009.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025.

Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

JURNAL

Akbar, Ryan. "Penegakan Hukum Pidana di Bidang Lingkungan Hidup: Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup". *Syntax Idea* 3(1).
<https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i7.1374>.

Alun P. Milford. "Deferred Prosecution Agreement." Milford International *Training Course Visiting Experts*.

Antoni, Feri and Nani Mulyati. "Economic Analysis of Law in Countering Corporate Crime." *Journal of Law, Politic, and Humanities* 4(6).
<https://doi.org/10.38035/jlph.v4i6.793>.

Binawang, Andang and Maria Grasia. "Implementasi Hak atas Lingkungan Hidup yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan Dalam Konteks Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 9(1). <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.499>.

Eunnice Chiu and Benedict. "Deferred Prosecution Agreements in Singapore: What is the Appropriate Standard for Judicial Approval". *International Commentary on Evidence*. 2019.

Farida, Hanna. Dkk. "Adopting the Concept of Green Victimology in Recognizing the Environment as Victims Within The Indonesia Criminal Justice." 3(3). <https://doi.org/10.62264/jlej.v3i3.217>.

Ferdian, Ardi. "Konsep Deferred Prosecution Agreement Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Arena Hukum* 13 (3). <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01403.6>.

Greenbulm, Benjamin M. "What Happens to Prosecution Deferred? Judicial Oversight Corporate Deferred Prosecution Agreement." *Columbia Law Review* 105(6).

Hartiwiningsih. "Optimization of Criminal Sanctions Against Corporations in Restoring Environmental Function: An Ecological Justice Study." *IOC Con. Ser: Earth Environe.* 1537. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1537/1/01206>.

- Hawari, Azam. dkk. "Reorientasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Melalui Perjanjian Penangguhan Penuntutan." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 6(1). <https://doi.org/10.38011/jhli.v6i1.148>.
- Jae C. Jung. "Volkswagen's Diesel Emissions Scandal." *Thunderbird International Business Review*. 2017.
- Jake A. Naar. "In Defense of Deferred Prosecution Agreement as Miscariage of Justice: An Exploratory Study of Corporate Convenience." *New York Universtiy Journal of Law and Liberty* 11(2).
- Kurniawa, Dickri Agri and Zaina Arifin. "Rekonstruksi Pemidanaan Korporasi Dalam Kejahatan Lingkungan Hidup Sebagai Langkah Strategis Pembaharuan Hukum Nasional." *Judge: Jurnal Hukum* 6(3). <https://doi.org/10.54209/judge.v6i03.1566>
- Miller, Marry. "More Than Just A Potted Plant: A Court's Authority to Review Deferred Prosecution Agreement Under The Speedy Trial Act and Its Inherent Supervisory Power.". *Michigan Law Review* 115(1). <https://doi.org/10.36644/mlr.115.1.more>.
- Narendra, Satwika. dkk. "Pertanggungjawaban Korporasi Berdasarkan Kesalahan Menurut Hukum Pidana." *Jurnal Cendekia Ilmiah* 3(5).
- Nelson, Febby Mutiara. "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara: Dapatkah Menggunakan *Deferred Prosecution Agreement*?" *Jurnal Ilmiah Hukum* 26(2). <https://doi.org/10.28946/sc.v26i2.459>.
- Panggabean, Mompang L. "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana." *Jurnal Dictum* 12.

- Prangsi, Daffa, dkk. "Urgensi Integrasi Biaya Pemulihan Lingkungan Dalam Sanksi Pidana Denda." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 8(2). <https://doi.org/10.38011/jhli.v8i2.413>.
- Pratama, Ilham Nur. "Legal Comparison of Deferred Prosecution Agreement Methods in the USA, UK, and Indonesia for Recovering State Financial Losses Due to Corruption Crime." *Corruptio* 4(2). <https://doi.org/10.25041/corruptio.v4i2>.
- Putri, Sindy Riani, Shane Evelina, and Diah Ayu. "Rekonstruksi Sanksi Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berparadigma *Green Victimology*." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2(12). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i12.144>.
- Radziq, Sahran and Gatot Sugiharto. "*Vicarious Liability* Dalam KUHP Nasional Dikaji dari Perspektif Living Law di Yogyakarta". *Jurnal Lex Raissance* 9(1). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art7>.
- Ramelan, Yudha. "Penerapan Sanksi Pidana Korporasi Pada Bank dan Implikasinya." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48(4). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no4.1806>.
- Rodliyah, Any Suryani, dkk. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*corporate crime*) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Kompilasi Hukum* 5(1). <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43>.
- Syafitri, Elly. dkk. "Penjatuhan Pidana Tambahan Terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor

349/Pid.B/LH/2019/PN.Plw).” *Journal of Academic Literature Review* 3(1). <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i1.280>.

Utami, DwiYanti and Hudi Yusuf. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Ekonomi.” *Journal of Global and Multidisciplinary* 2 (11).

SKRIPSI

Purba, Anindita Yulidaningrum. 2021. “Proporsionalitas Penerapan Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia.” Depok.

INTERNET

Ady Thea. 2021. “Eksekusi Pidana Tambahan Pemulihan Lingkungan Hidup Berpotensi Sulit Dilaksanakan.” January 21, 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/a/eksekusi-pidana-tambahan-pemulihan-lingkungan-hidup-berpotensi-sulit-dilaksanakan-lt600964c616337/>.

Ady Thea. 2025. “Walhi Laporkan 47 Perusahaan atas Dugaan Perkara Lingkungan Hidup dan Korupsi SDA.” March 8, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/walhi-laporkan-47-perusahaan-atas-dugaan-perkara-lingkungan-dan-korupsi-sda-lt67cbdc8b0e32b/>.

Agungnoe. 2025. “Bencana Banjir Bandang Sumatera, Pakar UGM Sebut Akibat Kerusakan Ekosistem Hutan di Hulu DAS. December 1, 2025. <https://ugm.ac.id/id/berita/bencana-banjir-bandang-sumatra-pakar-ugm-sebut-akibat-kerusakan-ekosistem-hutan-di-hulu-das/>.

- Firda Dwi. 2025. "Izin Dicabut! 28 Perusahaan Tetap Wajib Tuntaskan Kerugian Lingkungan." CNBC Indonesia. 26 Januari 2025.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20260126155218-4-705397/izin-dicabut-28-perusahaan-tetap-wajib-tuntaskan-kerugian-lingkungan>.
- Herbert Smith. 2024. "*UK Deferred Prosecution Agreements*." January 10, 2024.
<https://www.hsfkramer.com/insights/2019-01/UK-Deferred-Prosecution-Agreements>
- Irfan Maulana. 2024. "Perusahaan Sawit Kena Denda Ajukan Pailit, KHLK Melawan." 18 Februari 2024.
<https://mongabay.co.id/2024/02/18/perusahaan-sawit-kena-denda-ajukan-pailit-klhk-melawan/>
- Kementerian Kehutanan. 2025. "Kementerian Kehutanan Tindak 11 Entitas Usaha, 4 Korporasi, 7 PHAT, Diduga Terkait Penyebab Banjir di Sumatera Utara" December 11, 2025. <https://www.kehutan.go.id/news/kemenhut-tindak-11-entitas-usaha-4-korporasi-dan-7-phat-diduga-terkait-penyebab-banjir-di-sumatera-utara>.
- Norton Rose Fulbright. "*UK First Deferred Prosecution Agreement- Key Themes Emerge*." November, 2015. <https://www.nortonrosefulbright.com/en-bi/knowledge/publications/1d8c4942/uks-first-deferred-prosecution-agreement---key-themes-emerge>

Norton Rose Fulbright. (2014, November). *Asia Pacific Insights: Issue 14*. Diambil dari <https://www.nortonrosefulbright.com/-/media/files/nrf/nrfweb/imported/asia-pacifi-insights---issue-14.pdf>

Pradipta Pandu. “Kasus Kejahatan Lingkungan Ditangani Sepanjang 2023.” *Kompas*, December 8, 2023. <https://www.kompas.id/artikel/sebanyak-908-kasus-kejahatan-lingkungan-ditangani-sepanjang-2023>.

Serious Fraud Office & Crown Prosecution Service. (2014). *Deferred Prosecution Agreements Code of Practice*.

Weiyi Tan. “*First Case in Singapore Involving the Use of A Deferred Prosecution Agreement to Address Corporate Criminal Liability*.” August, 2025. <https://www.clydeco.com/en/insights/2025/08/dpa-corporate-criminal-liability-singapore>

LAPORAN

Anindarini, G., dkk. (2021). *Menakar Ulang Pengaturan Izin Lingkungan dan Penegakan Hukum dalam UU Cipta Kerja (Seri Analisis Hukum Lingkungan No. 6)*. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). https://icel.or.id/media/pdf/ICEL_SeriAnalisis6.pdf